



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SAMSUL BAHRAWI
NIK : 5271040512820002
Lembaga : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Kerja : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
Sub Unit Kerja : BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN
Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 10 Februari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMSUL BAHRAWI**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **934832**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	622.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/6 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 301.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/10 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. Tanah Seluas 474 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 171.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.500.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	158.900.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	807.400.000
III. HUTANG	Rp.	150.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	656.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.